

## DAFTAR PUSTAKA

- Salancik, G. R., dan Pfeffer, J. (1978). *A Social Information Processing Approach to Job Attitudes and Task Design*. *Administrative Science Quarterly*. Vol. 23 No. 2, pp. 224-253.
- Susanto, Ely. (2009). Memahami Korupsi Dari Perspektif Perilaku Organisasi : Mengapa Seseorang Terjebak Dalam Perilaku Korupsi. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada*. Vol. 13 No. 1, pp. 18-30.
- Bamidele, O., Azeez, O., dan Ayodele, B. (2016). *Culture, Corruption, and Anticorruption Struggles In Nigeria*. *Journal of Developing Societies*. Vol. 32 No. 2, pp. 103-129.
- Bowler, Shaun., dan Donovan, Todd. (2016). *Campaign Money, Congress, and Perceptions of Corruption*. *American Politics Research*. Vol. 44 No. 2, pp: 272-295.
- Buttle, W, J., Davies, G, S., dan Meliala, E, Andrianus. (2016). *A Cultural Constraints Theory Of Police Corruption: Understanding The Persistence Of Police Corruption in Contemporary Indonesia*. *Australian and New Zealand Journal of Criminology*. Vol. 49 No. 3, pp. 437-454.
- Fischer, R., Ferreira, C, M., Milfont, T., dan Pilati, R. (2014). *Culture of Corruption? The Effects of Priming Corruption Images in a High Corruption Context*. *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 45 No. 10, pp. 1594-1605.
- O'Connor, S dan Fischer Ronald. (2011). *Predicting Societal Corruption Across Time: Values, Wealth, or Institutions?*. *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 20 No. 10, pp. 1-16.
- Salama, Nadiatus. (2014). Motif dan Proses Psikologis Korupsi. *Jurnal Psikologi*. Vol. 41 No. 2, pp.149-164.
- Rochman, G, Muthia dan Rochman Achwan. (2016). *Corruption Indonesia's Emerging Democracy*. *Journal of Developing Societies*. Vol. 32 No. 2, pp. 159-177.
- Klasnja, Marko. (2017). *Uniformed Voters and Corrupt Politicians*. *American Politics Research*. Vol. 45 No. 2, pp. 256-279.
- Mashali, Behzad. (2012). *Analizing The Relationship Between Perceived Grand Corruption And Petty Corruption In Developing Countries: Case Study Of Iran*. *International Review Of Administrative Sciencies*. Vol. 78 No. 4, pp. 775-787.

- Javor, Istvan dan David Jancsics. (2016). *The role of power in organizational corruption: an empirical study. Administration and society*. Vol. 48 No, 5, pp. 527-558.
- Ariely, Gal dan Eric M. Uslaner. *Corruption Fairness And Inequality*. (2016). *International Political Scieces Review*. Pp. 1-14.
- Kobis, Nils, C & Jan Williem Van Prooijen Franscesca Righetti, Paul A. M. Van Lange. (2017). *The Road Bribery And Corruption: Slippery Slope Or Steep Cliif?. Psychological Scieces*. Pp. 1-10.
- Slomczynsk, Kazimiers & Goldie Shabad. (2011). *Perceptions Of Political Party Corruption And Voting Behavior In Pollad. Party Politics*. Vol. 18 No. 6, pp. 897-917.
- Fein, Elke & Jurgen Wiebler. *Cognitive Basis For Corruption And Attitudes Towards Corruption In Organizatation Viewed From A Structuralist Adult Developmental Meta-Perpesctive*.
- Tarekjaber Lopez, & Auroragarcia. *Phisicologi Caland Behavioral Patters Of Corruption*. (2014). *Original Research Article*.
- Ghatak, Anirban & Sudarshan Iyengar. (2014). *Corruption Breeds Corruption*.
- Assegaf, Rachman, Abd. (2015). *Policy Analysis and Educational Strategy for Anti Corruption In Indonesia and Singapore*. Vol. 5 No. 11, pp. 611-625.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dwiyanto, Agus. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: NUANSA.
- Safroni, Ladzi. (2012). *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Aditya Media Publishing.
- Marsono. (2009). *Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Melalui Kebijakan Badan Layanan Umum (BLU)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Dwiyanto, Agus. (2002). *Membangun Sistem Pelayanan Publik Yang Memihak Rakyat*, Vol. 13 (1), 1-18.



- Marsono. (2009). Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Melalui Kebijakan Badan Layanan Umum (BLU). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Siagian, Sondang, P. (1994). Patologi Birokrasi : Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wasistiono, Sadu. (2001). Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah. Sumedang: Alqoprint.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance*, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: CV Citra Media.
- Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Ratminto, dan Atik Septi Winarsih. (2005). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- McDonald & Lawton. (1977). Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zeithaml, Parasuraman & Berry. (1990). Delivering Quality. Service: Balancing Customer Perception and Expectation. Jurnal of Marketing Vol. 49.
- Lenvinne. (1990). Responsiveness, Responsibility, Accountability. Free Print Mobile Collections Report Document.
- Dwiyanto, Agus. (2008). Mewujudkan *Good Governance*, Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Zoraya, Nabila. (2014). Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan di Sekolah yang Berada di Wilayah Hukum Kota Makassar tahun 2011-2013. Pp. 61-64.
- Widjojanto, Bambang. (2009). Problem, Kritik dan Perdebatan Penegakan Hukum, pp. 44.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2003). Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. (2008). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soedarso, B. (1969). *Korupsi di Indonesia*. Bharata Karya Aksara. Jakarta.
- Wertheim, F, W. (1956). *Indonesia Society in Transition A Study Of Social Change*. Sumur. Bandung.
- Istianto, Bambang. (2011). *Manajemen Pemerintahan dalam perspektif Pelayanan Publik*. Penerbit Mitra Wacana MediaBekerjasama dengan STIAM. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Medan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Indikasi Pungutan Liar Sekolah dasar dan Menengah**  
ZORAYA ALFATHIN R, Ely Susanto, S.I.P., MBA., Ph.D  
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.